

**RANWAL  
RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2020**



**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Alamat Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Kandungan 71213, Telpn (0517) 21283 Faxes. (0517) 24525**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 yang memuat TUJUAN dan SASARAN serta PROGRAM dan KEGIATAN yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang tersusun ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kandangan, 21 Januari 2019



**Drs. Kamidi, MIP**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19731115 199302 1 002

## DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD .....	15
BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	18
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD .....	18
3.3 Program dan Kegiatan .....	20
BAB IV    PENUTUP .....	26

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Tahun 2018	7
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. HSS Tahun 2018	11
Tabel 2.3	Target Indikator Kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. HSS Tahun 2019	12
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2020	15
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran serta Target Dinas PMD Tahun 2020	19
Tabel 3.2	Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ), sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang sudah ada berdasarkan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Tahun 2020 yang dibuat ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun yang dirumuskan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 ( Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 ) .

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja ( Renja – SKPD) adalah :

- 1). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) . Dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

- 2). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 137 ayat (1) menyatakan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.
- 5). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### a. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

#### b. Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2020.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 terdiri atas 4 Bab dengan susunan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini memuat tentang Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan.

##### **BAB IV. PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Rencana Kerja SKPD ( Renja ) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD ( Renstra ), tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja SKPD yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2020.

Pengertian kinerja itu sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan Renja SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun sebelumnya yaitu 2018 yang tertuang pada DPA SKPD Tahun 2018, sebagaimana terlihat pada tabel Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD dan Realisasi kegiatan sampai dengan Tahun 2019 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.1

**Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Tahun 2018  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Keuangan (Rp)</b>	<b>Realisasi Keuangan (%)</b>	<b>Realisasi Fisik (%)</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>659.218.100</b>	<b>630.727.012</b>	<b>95,68%</b>	<b>100%</b>
	1) Penyediaan jasa surat menyurat	1.400.000	1.123.700	80,26%	100%
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.800.000	27.525.592	72,82%	100%
	3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	2.750.000	1.789.900	65,09%	100%
	4) Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	10.913.000	99,21%	100%
	5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.300.000	1.240.000	23,40%	100%
	6) Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.024.200	25.018.200	99,98%	100%
	7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.192.500	14.597.940	96,09%	100%
	8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	3.434.000	2.635.600	76,75%	100%
	9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.615.400	101.629.000	96,23%	100%
	10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang - undangan	3.720.000	3.305.000	88,84%	100%
	11) Penyediaan Makanan dan Minuman	17.650.000	17.530.000	99,32%	100%

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	12)Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	327.182.000	324.781.080	99,27%	100%
	13)Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	33.150.000	29.150.000	87,93%	100%
	14)Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	70.000.000	69.488.000	99,27%	100%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>56.896.660</b>	<b>46.108.829</b>	<b>81,04%</b>	<b>100%</b>
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.696.660	31.167.000	98,33%	100%
	2.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.200.000	14.941.829	59,29%	100%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.700.800	3.700.800	100%	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>719.815.560</b>	<b>680.536.641</b>	<b>94,54%</b>	<b>100%</b>
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>	<b>251.567.800</b>	<b>238.630.000</b>	<b>94,86%</b>	<b>100%</b>
	1. Pembinaan Kelompok masyarakat Pembangunan Desa	163.221.800	151.439.000	92,78%	100%

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	2. Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	88.346.000	87.191.000	98,69%	100%
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>494.482.400</b>	<b>467.958.900</b>	<b>94,64%</b>	100%
	1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	494.482.400	467.958.900	94,64%	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>746.050.200</b>	<b>706.588.900</b>	<b>94,71%</b>	<b>100%</b>
<b>BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>					
<b>6</b>	<b>Program Pembinaan Keuangan Desa</b>	<b>431.319.200</b>	<b>244.920.000</b>	<b>82,57%</b>	<b>100%</b>
	1. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	215.291.040	176.761.200	82,10%	100%
	2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	12.286.000	7.570.000	61,61%	100%
	3. Pengendalian Pelaksanaan APBDes	61.780.000	54.720.000	88,57%	100%
	4. Koordinasi Laporan Keuangan Desa	7.258.400	5.868.800	80,86%	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>431.319.200</b>	<b>244.920.000</b>	<b>82,57%</b>	<b>100%</b>

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
<b>BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA</b>					
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>220.900.000</b>	<b>177.195.380</b>	<b>80,22%</b>	<b>100%</b>
	1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	90.566.000	67.367.000	74,38%	100%
	2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	36.618.000	29.192.000	79,72%	100%
	3. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa di Desa	66.906.000	53.871.380	80,52%	100%
	4. Inisiasi Pembentukan Kerja sama Desa	26.810.000	26.765.000	99,83%	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>220.900.000</b>	<b>177.195.380</b>	<b>80,22%</b>	<b>100%</b>

Dari Tabel tersebut terlihat jelas pencapaian hasil dari pada pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. Ada beberapa Program dan Kegiatan yang pencapaian anggaran yang belum Maksimal tetapi secara fisik kegiatan tersebut terlaksana 100 % sehingga ada efisiensi anggaran.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab.HSS disusun mulai Tahun 2017, karena sebagai organisasi Perangkat daerah yang baru. Adapun pengukuran atas capaian indikator kinerja Sasaran Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kab. HSS TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET 2018	CAPAIAN 2018
	URAIAN	INDIKATOR		
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70 %	71,91%
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70 %	100 %
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	41 %	41,66 %
3	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	80 %	83,33%
4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %	82,84 %
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100%
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100%
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A	BB

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan dari 8 buah indikator kinerja Dinas PMD tahun 2018, terdapat 7 buah Indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yang diharapkan dan ada 1 buah indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Nilai Evaluasi AKIP.



Adapun Target kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tahun 2019 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. 2.3**  
Target Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kab. HSS TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET 2019
	URAIAN	INDIKATOR	
1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,6377
2	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	Persentase Pemerintahan Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan.	8,33%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Predikat AKIP	79,41%

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa atau Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek pembangunan atau lokus pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga paradigma baru muncul istilah membangun desa dan desa membangun.

Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memposisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5.000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2.000 Desa Mandiri.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki 144 Desa, dimana muara dari setiap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mendukung capaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mewujudkan masyarakat yang Cerdas, Inovatif, Teknologis guna terwujudnya kesejahteraan dunia dan akhirat semua menuju sasaran pada titik yang sama yaitu masyarakat Hulu Sungai Selatan yang tinggal di Desa-Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan desa untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, Disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pada kondisi saat ini untuk mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju Desa yang mandiri dan maju ada beberapa tantangan dengan pokok persoalan, yaitu :

- 1). Belum adanya sinergisitas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sasaran yang ada pada organisasi perangkat daerah.
- 2). Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan belum berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari kecenderungan dalam pengelolaan pemerintahan desa masih didominasi oleh Kepala Desa.
- 3). Belum adanya Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terintegrasi dan terkoneksi antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada pada organisasi perangkat daerah dengan kegiatan yang disusun oleh Desa ;
- 4). Kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa belum memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka disusun program dan kegiatan untuk tahun 2019 sebagai berikut :

- a). Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, dengan kegiatan :
  1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus LPM Desa
  2. Kegiatan Bimbingan Teknis Kader Posyando
  3. Kegiatan Penilaian Gotong Royong Masyarakat
  4. Kegiatan Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna
  5. Kegiatan Penilaian Posyandu
  6. Kegiatan Bimbingan Teknis RT / RW
- b). Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
  1. Kegiatan Pelayanan Desa secara Online
  2. Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes
  3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa

4. Kegiatan Pelaksanaan e-Monitoring System Desa
  5. Kegiatan Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan
- c). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan kegiatan :
1. Kegiatan Workshop Kemitraan Bumdes
  2. Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
  3. Kegiatan Pelatihan Unit Pelaksana Kegiatan / UPK/PNPM

## 2.4 Rencana Kerja Tahun 2019

Berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 terdapat beberapa program dan kegiatan dengan target kinerja dan pagu anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4

Ringkasan Rencana Kerja Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)
1.	<b>Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>				166.665.000,00
	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengurus LPM Desa	Kabupaten	Pengurus LPM yang terampil	40 Orang	40.100.000
	Kegiatan Penilaian Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten	Desa yang memiliki budaya Gotong Royong tinggi	11 Desa	59.275.000
	Kegiatan Penilaian Inovasi Teknologi Tepat Guna	Kabupaten	Inovator TTG yang terseleksi	3 Inovasi	20.110.000
	Kegiatan Penilaian Posyando	Kandangan	Posyando yang berprestasi	11 Posyando	47.090.000
	Kegiatan Bimbingan Teknis RT / RW	Kandangan	Pengurus RT / RW yang terampil	40 Orang	34.700.000
2..	<b>Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa</b>				217.125.000,00
	Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes	Kandangan	APBDes yang berkualitas	288 Dokumen	139.407.000
	Kegiatan Pelaksanaan e-Monitoring System Desa	Kandangan	Desa yang menerapkan e-Monitoring System	22 Desa	45.030.000
	Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Kandangan	Desa dan Kelurahan yang berprestasi	118 Desa dan Kelurahan	36.400.000

3.	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b>				38.950.000
	Kegiatan Workshop Kemitraan Bumdes	Kandangan	Bumdes yang berkembang	40 Bumdes	24.172.500
	Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kandangan	Kawasan Perdesaan Baru yang terbentuk	80 Orang	14.992.500
4	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				650.966.600
	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor				54.241.600
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				45.000.000
	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD				14.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman				25.200.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya				44.850.000
	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan				467.675.000
5	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				143.937.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				97.987.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				38.850.000
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				7.100.000
6	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				9.586.000

*Ranwal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS Tahun 2020*

	Penyusunan Dokumen Keuangan				4.741.000
	Penyusunan Dokumen AKIP				4.845.000
7	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah</b>				582.402.400
	Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur				87.870.000
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga				494.532.400
JUMLAH					1.809.632.000

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Salah satu nawa cita pemerintah yaitu membangun dari pinggiran yang mengedepankan peran Desa yang bukan sekedar sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek yang ikut serta terlibat dalam proses pembangunan. Upaya penguatan Desa dari Pemerintah salah satunya dengan kebijakan penyaluran Dana Desa. Sasaran pembangunan nasional dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yaitu mengurangi jumlah Desa tertinggal dan meningkatkan jumlah Desa Maju dan Mandiri. Hal ini juga menjadi perhatian dan menjadi salah satu sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu meningkatnya Desa berkinerja baik. Kedua hal ini juga mendasari perumusan kebijakan dan sasaran strategis Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu SKPD penanggungjawab pencapaian indikator kinerja sebagai penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang di RPJMD 2018-2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Program dan kegiatan Dinas PMD direncanakan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam RPJMD 2013-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu SKPD yang diamanatkan untuk melaksanakan 2 (dua) misi dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

- 1). Misi 4 : Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan, yang dijabarkan pada salah satu sasaran strategis yaitu meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat yang diukur dari indeks desa membangun sebagai indikator kinerja.
- 2). Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, dengan salah satu tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, kemudian dijabarkan dengan beberapa sasaran strategis salah satunya yaitu meningkatnya penggunaan sistem



informasi daerah yang diukur dari persentase pemerintah desa yang menggunakan informasi teknologi (IT) dalam pemberian pelayanan sebagai indikator kinerjanya.

Berdasarkan rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut di atas, maka dirumuskan tujuan, dan sasaran strategis Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas PMD Tahun 2020**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET SASARAN 2020
1	Meningkatkan Sumber Daya Daerah berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	0,6551
2	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya penggunaan system informasi daerah	Persentase Pemerintah Desa yang menggunakan Teknologi Informasi dalam pemberian pelayanan	15,97%
3	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Predikat AKIP	BB

Indesk Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari nilai indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. IDM digunakan sebagai alat ukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Adapun IDM yang menjadi target kinerja Dinas PMD adalah nilai rata-rata IDM seluruh Desa se Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan pengukuran persentase pemerintah desa yang menggunakan TI dalam pemberian pelayanan diukur dengan menjumlah desa yang telah menggunakan IT dalam pelayanan masyarakat di Desa dibandingkan dengan seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam rencana program dan kegiatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020, yaitu :

- 1). Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
  - Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
  - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
  - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Lainnya
  - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan lapangan
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 3). Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP
- 4). Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
  - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur
  - Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- 5). Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - Kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat
  - Kegiatan Penataan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat
  - Kegiatan Penilaian Gotong Royong Masyarakat
  - Kegiatan Penilaian Posyando

- 6). Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa
- Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes
  - Kegiatan Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan
  - Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa
  - Kegiatan Penyusunan Informasi Dasar Data Profil Desa dan Kelurahan
  - Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Pemerintahan Desa.
- 7). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- Kegiatan Workshop Kemitraan Bumdes
  - Kegiatan Pembinaan Tata Kelola BUMDes
  - Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi Teknologi Tepat Guna.

Rencana program dan kegiatan Dinas PMD Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2020**  
**Dan Perkiraan Maju Tahun 2021**

KODE	Urusan.Bidang Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prog/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif			
2.07				Pemberdayaan Masyarakat Desa								
2.07	01	01		Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan (IKM)	SKPD	83	650.966.600	APBD		83	655.000.000
2.07	01	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	54.241.600	APBD	-	1 Thn	55.000.000
2.07	01	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	45.000.000	APBD	-	1 Thn	46.000.000
2.07	01	01	06	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	14.000.000	APBD	-	1 Thn	15.000.000
2.07	01	01	07	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	25.200,000	APBD	-	1 Thn	26.000.000
2.07	01	01	09	Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis lainnya	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	44.850.000	APBD	-	1 Thn	45.000.000
2.07	01	01	10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Administrasi sesuai standar	SKPD	1 Tahun	467.675.000	APBD	-	1 Thn	468.000.000

*Ranwal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS Tahun 2020*

2.07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan (IKM)	SKPD	83	143.937.000	APBD		83	144.500.000
2.07	01	02	14	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	SKPD	1 Tahun	97.987.000	APBD	-	1 Tahun	98,000,000
2.07	01	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	SKPD	1 Tahun	38.850.000	APBD	-	1 Tahun	39,000,000
2.07	01	02	31	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan gedung kantor kondisi baik	SKPD	1 Tahun	7.100,000	APBD	-	1 Tahun	7.500,000
2.07	01	06		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen keuangan daerah dan SAKIP	LKPD dan LKj	100%	9.586.000	APBD		100%	10.000.000
2.07	01	07	07	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	SKPD	12 laporan Keuangan	4.741.000	APBD	-	12 laporan	5.000.000
2.07	01	07	07	Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas	SKPD	15 laporan Capaian Kinerja	4.845.000	APBD	-	15 laporan Capaian Kinerja	5.000.000
2.07	01	06		Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan (IKM)	SKPD	83	582.402.400	APBD		83	584.000.000
2.07	01	07	07	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kinerja Aparatur	Pelayanan Perangkat Daerah sesuai standar	SKPD	1 Tahun	87.870.000	APBD	-	1 Tahun	89.000.000
2.07	01	07	07	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Pelayanan Perangkat Daerah sesuai standar	SKPD	1 Tahun	494.532.400	APBD	-	1 Tahun	495.000.000

*Ranwal Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS Tahun 2020*

2.07	01	17		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif</b>	<b>LKD dan LAD</b>	<b>77,32%</b>	244.170.000	APBD	-	81,01%	246.000.000
2.07	01	17	02	Kegiatan Penilaian Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yg memiliki budaya gotong royong tinggi yang dinilai	Kab.HSS	11 Desa	59.275.000	APBD	-	11 Desa	60.000.000
2.07	01	20	01	Kegiatan Penilaian Posyandu	Jumlah Posyandu tk Kec yang berprestasi dan dinilai Tk. Kab.	Kab.HSS	11 Posyandu	47.090.000	APBD	-	11 Posyandu	48.000.000
2.07	01	20	02	Kegiatan Penataan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat	Jumlah LKD/Adat yang memenuhi standar	Kab.HSS	60 LKD	97.905.000	APBD	-	60 LKD	98.000.000
2.07	01	20	03	Kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat	Jumlah Pengurus LKD/Adat yang terampil	Kab.HSS	40 orang	39.900.000	APBD	-	40 orang	40.000.000
2.07	01	21		Program pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	<b>Persentase Pemerintahan Desa/kel yang berkinerja baik</b>	<b>Desa</b>	<b>33,33%</b>	297.940.800	APBD	-	40,97%	311.000.000
2.07	01	21	01	Kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Rancangan APBDes	APBDes yang berkualitas	Kab.HSS	288 Dokumen	136.455.000	APBD	-	288 Dokumen	137.000.000
2.07	01	21	04	Kegiatan Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan	Desa / Kelurahan yang berprestasi	Kab.HSS	114 Desa & 4 Kel	36.300.000	APBD	-	114 Desa & 4 Kel	37.000.000

2.07	01	21	05	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah BPD yang mengikuti pelatihan Awal masa tugas	Kab.HSS	144 orang	44.369.800	APBD	-	144 orang	45.000.000
2.07	01	21	06	Penyusunan Informasi Dasar Data Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan kelurahan yang mengupdate data profil penyelenggaraan Pemdes dan kelurahan	Kab.HSS	11 Profil Desa/kel	42.715.000	APBD	-	11 Profil Desa/kel	53.000.000
2.07	01	21	07	Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah Aplikasi pelayanan pemdes berbasis IT	Kab.HSS	1 Aplikasi	38.101.000	APBD	-	1 Aplikasi	39.000.000
2.07	01	18		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berkembang	Kab.HSS	21,52%	79.820.000	APBD	-	29,16%	81.000.000
07	01	18	03	Kegiatan Workshop Kemitraan Bumdes	Bumdes yang berkembang	Kab.HSS	40 BUMDes	24.520.000	APBD	-	40 BUMDes	25.000.000
2.07	01	18	04	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola BUMDes	Jumlah pengurus BUMDES yang terampil dalam pengelolaan manajemen keuangan	Kab.HSS	40 Orang	25.000.000	APBD	-	80 Orang	25.000.000
2.07	01	18	05	Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Inovasi TTG yang ditemukan dan dimanfaatkan	Kab.HSS	3 Inovator	30.300.000	APBD	-	3 Inovator	31.000.000
<b>JUMLAH</b>								<b>2..008.822.800</b>				<b>2.021.500.000</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020.

Kandangan, 21 Januari 2019



**Ms. LAMIDI, MIP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731115 199302 1 002